

BALI DEMOCRACY STUDENT CONFERENCE; PROMOSI DEMOKRASI INDONESIA MELALUI *PEOPLE TO PEOPLE DIALOGUE* DALAM FORUM ANTAR PEMERINTAH

Elnovani Lusiana¹, Triono², Samson. CMS³

¹Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

²Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Megou Pak Tulang Bawang

³Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
elnovani.lusiana@unpad.ac.id

Diterima: 29 Oktober 2019 Disetujui: 2 Maret 2020 Dipublikasikan: 6 Maret 2020

ABSTRACT

This paper describes twice the implementation of the Bali Democracy Students Conference (BDSC) as a parallel forum in the Bali Democracy Forum (BDF) in 2017 and 2018. The practice of people to people (P2P) in intergovernmental forums (government to government/G2G) is useful soft diplomacy typical of the Indonesian title through the Bali Democracy Forum. In the discussion section, the author discusses to study and understand the appearance of BDSC where the features of soft diplomacy, G2G which accommodates P2P, are practically implemented with strategies and strategies. An attractive and renewed discussion in this paper brings conclusions about the two times the implementation of BDSC in BDF X in 2017 and BDF XI in 2018 has become a powerful promotional media in spreading Indonesia's climate change cooperation in the Asia Pacific Region.

Keywords: *BDSC, BDF, Soft Diplomacy, Public Diplomacy, P2P, G2G, Promotion of Democracy.*

ABSTRAK

Soft diplomacy adalah bentuk inisiatif pemerintah yang memperhatikan dan mengikutsertakan peran aktor non pemerintah untuk kepentingan pengaruhnya dalam jangka panjang terhadap hubungan diplomatic di masa depan. Tulisan ini memaparkan dua kali penyelenggaraan *Bali Democracy Students Conference (BDSC)* sebagai forum pararel dalam *Bali Democracy Forum (BDF)* tahun 2017 dan 2018. Penerapan *people to people (P2P)* dalam forum antar pemerintah (*government to government/G2G*) sebagai karakteristik yang khas dari gelaran *soft diplomacy* Indonesia melalui *Bali Democracy Forum*. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode *fenomenology*. Dalam bagian pembahasan, penulis bertujuan untuk mengkaji secara tajam dan mendalam tampilan BDSC dimana karakteristik *soft diplomacy, G2G* yang mengakomodir *P2P*, secara praktis diimplementasikan taktis dan strategis. Pembahasan yang atraktif dan mengusung kebaruan dalam tulisan ini membawa kepada kesimpulan bahwa dua kali penyelenggaraan BDSC dalam BDF X tahun 2017 dan BDF XI tahun 2018 telah menjadi media promosi yang ampuh dalam menyebarluaskan pengaruh keberhasilan transformasi demokrasi Indonesia di Kawasan Asia Pasifik.

Kata kunci: *BDSC, BDF, Soft Diplomacy, Diplomasi Publik, P2P, G2G, Promosi Demokrasi.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2017, *soft diplomacy* Indonesia, *Bali Democracy Forum (BDF)*¹ sampai kepada tahun kesepuluh penyelenggaraan di bawah naungan Direktorat Diplomasi Publik, (DITDIPLIK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (KEMLU RI). Berarti genap satu dasawarsa BDF membingkai sejarah transformasi demokrasi Indonesia dalam wacana global. Goresan tinta insan media yang memaparkan perhelatan BDF di tahun 2018 telah menarik penulis untuk memperhatikan kebaruan BDF X di tahun 2017 yang berlanjut di tahun 2018, yaitu hadirnya forum paralel *Bali Democracy Student Conference (BDSC)*.

Dalam sebuah petikan wawancara penulis dengan Risa, Devdy (2017), salah satu pejabat di DITDIPLIK KEMLU RI yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan BDF X mengatakan BDF X menawarkan suatu kebaruan dan perbaikan tentu saja. Forum di kawasan yang diawali dengan *opening* (Kepala Negara *Chair & co Chair*), *general debates* (setingkat menteri luar negeri/delegasi) yang dipararelkan dengan kelas diskusi setingkat non menteri. BDF *Chapter* Tunis yang berlangsung interaktif juga keterlibatan BDSC (*Bali Democracy Students Conference*) sebuah forum bagi para penstudi Hubungan Internasional yang berminat untuk hadir dalam BDF”.

Kehadiran BDSC sebagai salah satu kebaruan di tahun 2017 lalu telah membawa antusiasme yang semakin meluas dalam penyelenggaraan BDSC kedua kalinya di tahun 2018. Jumlah peserta BDSC II dapat dilihat dari kemlu.go.id, tercatat sekitar 137 orang mahasiswa asing yang berasal dari 58 negara, mereka berbagi pengalaman demokrasi yang terjadi di negaranya. Para delegasi BDSC diajak untuk mengikuti 3 sesi konferensi, dimana hasil akhirnya adalah sebuah dokumen (*outcome*) yang memberikan rekomendasi. Dokumen tersebut dipersentasikan di hadapan delegasi dari negara-negara yang merupakan peserta *Bali Democracy Forum* (BDF).

Mengutip dari laman dokumentasi kemlu.go.id, di dalam *flyer* BDSC yang disebarluaskan untuk mahasiswa internasional di tahun 2018 dikatakan bahwa *Bali Democracy Students Conference (BCSD)* adalah *a conference among students on the issues of democracy, as part of the 10th Bali Democracy Forum (BDF), The Second BDSC is held in Nusa Dua, Bali, Indonesia, on 6-7 December 2018, parallel with the BDF XI and the Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF)*.

Menurut KEMLU RI, tujuan utama diadakannya BDSC adalah antara lain:

- a. *To provide a forum for young generation from many countries to discuss issues concerning democracy.* (menyediakan forum bagi generasi muda untuk berdiskusi tentang demokrasi).
- b. *To transfer and share knowledge about the discourse on democracy at the BDF to young generation* (wahana transfer dan berbagi pengetahuan tentang demokrasi dalam BDF kepada generasi muda)
- c. *To get inputs, new ideas, and absorb aspirations and perspectives of the students concerning democracy* (untuk memperoleh input atau masukan berupa gagasan baru, aspirasi dan cara pandang generasi muda terkait demokrasi).

Peserta BDSC diperuntukkan bagi 150 orang. Sebagian besar merupakan mahasiswa Indonesia yang sedang melaksanakan studi di universitas dalam dan luar negeri dan, atau

¹Topik kajian yang dibahas dalam disertasi Lusiana, E. 2018. *Soft Diplomacy* Indonesia Melalui *Bali Democracy Forum* dalam Mendukung Kerjasama Regional Asia Pasifik. Program Studi Doktor Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.

mahasiswa International dari seluruh negara di dunia. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi peserta BDSC, diantaranya:

- a. Mahasiswa tingkat sarjana dan magister yang memiliki ketertarikan di bidang politik, khususnya tema demokrasi
- b. Berusia antara 21-28 tahun
- c. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik
- d. Memiliki kemampuan atau pengalaman berorganisasi
- e. Memiliki aktivitas di media sosial.

Untuk berpartisipasi dalam BDSC, para peserta mahasiswa tersebut diharuskan melengkapi persyaratan dengan sejumlah dokumen, seperti formulir aplikasi, *curriculum vitae*, surat rekomendasi dari universitas tempat mereka studi, *fotocopy* identitas atau *passport*, foto diri, Surat pernyataan kesediaan berpartisipasi dalam program BDSC, esay dalam bahasa Inggris dengan topik *Democracy for Prosperity: Youth Perspectives* dan tidak ketinggalan yang paling menarik adalah 30 detik profil diri dengan pandangan pribadi tentang demokrasi yang diunggah di akun media sosial masing-masing. KEMLU RI bertanggungjawab atas keseluruhan biaya akomodasi seluruh peserta BDSC.

Outline conference mengangkat tema “*Democracy for Prosperity, Youth Perspectives*” dibuka dengan *opening session* bersama-sama dengan BCSMF dalam BDF XI dilanjutkan dengan diskusi panel yang digelar di hari pertama. Selanjutnya di hari kedua peserta BDSC kembali bergabung dengan BCSMF dalam BDF XI untuk gelaran diskusi panel dan *closing session* dimana salah satu representasi BDSC akan menyampaikan rekomendasinya. Untuk kebutuhan data lapangan terkait penyelenggaraan BDSC ini, penulis sempat meliput beberapa hasil dokumentasi dari media serta wawancara langsung dengan peserta BDSC. Pada bagian pembahasan akan dianalisa bagaimana tujuan serta pencapaian BDSC di tahun kedua penyelenggaraannya.

BDSC semakin menarik perhatian dari publik mancanegara. Untuk mengetahui tentang karakteristik *soft diplomacy* Indonesia melalui BDSC dalam rangkaian BDF, maka melalui kajian beberapa literatur yang erat dengan topik penulisan, makapenulis menentukan konsep *soft diplomacy* dalam diplomasi publik akan digunakan dalam membahas karakteristik *soft diplomacy* BDSC sebagai *P2P contact* dalam *G2G Forum* (BDF).

Soft diplomacy telah terbukti ada dan populer dipraktikkan oleh beberapa negara di belahan Eropa. Akan tetapi Indonesia juga telah mengimplementasikan konsep ini dengan pendekatan yang khas tentu saja. Di dalam Lusiana (2018) dijelaskan pengertian *soft diplomacy* yang berbeda dari *soft power*, dikemukakan oleh Srivastava:²

The soft diplomacy is different from the soft power concept. Soft diplomacy depends upon the aid and mediation and is largely normative by nature, on the other hand soft power depends the application of the cultural and other related threads in obtaining the goals. In contrast the soft diplomacy is adopted by its practitioner in a voluntary manner as it is not a compulsion upon them they should even enter the complexities of the global politics as their existence is never under threat by any means.

Lebih lanjut Srivastava³ memaparkan definisi *soft diplomacy* sebagai praktek kebijakan luar negeri dari sebuah negara atau organisasi regional yang tidak secara eksklusif melayani kepentingan negaranya saja, akan tetapi sudah menyentuh kepada kepedulian

²Srivastava, Vivek Kumar. 2013. *Soft Power And Soft Diplomacy: Nature, Comparison And Impact*. University of Southern Denmark, Campus Sonderborg, Denmark.

³Ibid

terhadap kepentingan global, misalnya membantu permasalahan ekonomi maupun politik yang sedang dihadapi oleh negara lain.

Sebagai salah satu contoh, Norwegia, negara dengan *Human Development Index* tertinggi di dunia dan Uni Eropa telah menjadi pemain *soft diplomacy* yang mengemuka. Di Norwegia, prioritas kebijakan luar negeri pemerintahnya adalah promosi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi. Norwegia juga mendukung penyusunan draft hukum yang mengatur etika bagi insan media di negara yang demokratis, kebijakan sensor, promosi kebebasan media dan aktif berkontribusi meningkatkan kualitas jurnalistik yang bekerja di berbagai belahan negara di dunia. Norwegia juga tercatat aktif berperan dalam arena perdamaian dunia terutama dalam resolusi konflik misalnya yang telah dilakukan di Columbia, Brazil hingga Afrika Selatan dan Sri Lanka. Ada pula paparan artikel lainnya dari Burnay (2014) yang menggambarkan tentang *soft diplomacy* melalui *people-to people dialogue* dalam kerjasama *Strategic Partnership* Uni Eropa dan PRC (*People's Republic of China*).

Menurut Burnay⁴ *soft diplomacy is one particular soft part of the new public diplomacy, namely the use of instruments which invest in mutual exchanges and learning processes rather than actions that tend to influence the attraction of the other by unilateral means (such as the set-up of cultural institutes in third countries)*. Lebih lengkap lagi Burnay mengemukakan lima komponen yang harus muncul sebagai karakteristik dari praktik *soft diplomacy*:

- a. Penguatan *soft power*
- b. Proses *two way street* (komunikasi dua arah) dalam pertukaran ide berdasarkan kesepahaman
- c. Implementasi *two way street* (komunikasi dua arah) dalam pertukaran ide, proses saling belajar satu sama lain dan proses *self reflexive*
- d. Mengakomodir kehadiran *non governmental actor* atau aktor non pemerintah.
- e. Bermuatan *soft issue* (misalnya isu-isu terkait hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya).

Soft diplomacy erat sekali dengan inisiatif pemerintah yang memperhatikan untuk mengikutsertakan (tidak mengesampingkan) peran aktor non pemerintah jika berbicara pengaruhnya dalam jangka panjang terhadap hubungan diplomatik di masa depan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif khususnya dengan tehnik studi kasus. Untuk memperoleh data yang akurat penulis melakukan wawancara, observasi langsung serta menggali dokumentasi terkait *Bali Democracy Students Conference* dalam *Bali Democracy Forum* yang digawangi oleh DITDIPLIK Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bali Democracy Students Conference (BDSC) telah mencapai tahun kedua pelaksanaan. *From Campus to democracy* menjadi *tagline flyer invitation* bagi para mahasiswa penstudi politik atau ilmu Hubungan Internasional di dunia. Menurut A.M. Fachir dalam *closing remarks BDF XI tahun 2018, The 2nd BDSC as a forum to pass the torch of the spirit of democracy to the youth have deliberated that youth and education are two*

⁴Burnay, Matthieu; Hivonnet, Joelle & Raube, Kolja. 2014. "Soft Diplomacy" and People to People Dialogue between the EU and the PRC. *European Foreign Affairs Review* 19, Special Issue (2014): 35-56. Kluter Law International BV. The Netherlands

inseparable variables to create positive changes in society as well as contribute in making inclusive democracy and prosperity.

Apa yang disampaikan oleh Fachir dalam pidato penutupannya senada dengan kesan yang disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kalla dalam *Closing remarks* di BDF X tentang BDSC, BDF X di tahun 2017 telah sukses menghadirkan sejumlah perwakilan dari banyak negara, peristiwa ini juga menghadirkan generasi muda. "Saya berterima kasih untuk keterlibatan para pemuda, mahasiswa sebagai kader pimpinan di masa yang akan datang dari setiap negara yang secara bersamaan melaksanakan konferensi demokrasi di tingkat pemuda (mahasiswa). Generasi muda dalam rangkaian sejarah, sejak awal telah menjadi gambaran demokrasi. Kemajemukan, toleransi, cinta perdamaian dan sekaligus berperan sebagai agen dalam menciptakan perdamaian. Oleh sebab itu, apabila negara tidak mampu melaksanakan demokrasi seperti yang seharusnya, maka akan mengundang kemunculan radikalisme. Dimana hampir dapat dipastikan bahwa semua praktik radikalisme bermula dari kaum muda yang hanya diajarkan untuk meraih tujuan tanpa melalui rangkaian proses yang benar.

Soft diplomacy terbukti telah dilaksanakan KEMLU RI. Indonesia mengimplementasikan konsep ini dengan pendekatan khusus. Dalam bagian kajian pustaka, Lusiana(2018) menjelaskan pengertian *soft diplomacy* yang berbeda dari *soft power*, dikemukakan oleh Srivastava: *The soft diplomacy is different from the soft power concept. Soft diplomacy depends upon the aid and mediation and is largely normative by nature, on the other hand soft power depends the application of the cultural and other related threads in obtaining the goals. In contrast the soft diplomacy is adopted by its practitioner in a voluntary manner as it is not a compulsion upon them they should even enter the complexities of the global politics as their existence is never under threat by any means.*⁵

Penajaman perbedaan antara praktik *soft power* dan *soft diplomacy* telah mengundang keingintahuan penulis untuk membandingkan terlebih dahulu dengan fenomena BDSC dalam BDF yang terjadi di Indonesia. *Soft power* terbatas pada pengelolaan nilai-nilai yang dapat menarik perhatian dunia, misalnya budaya guna memenangkan hati/pikiran serta keberpihakan public global.⁶ Apa yang dilakukan Indonesia melalui BDSC dalam BDF lebih kepada *soft diplomacy*. Hal tersebut jelas nampak apabila dianalisa dari tujuan atau *goals* yang hendak dicapai, yaitu bukan hanya sebatas menarik perhatian dunia untuk memperjuangkan kepentingan nasional, akan tetapi lebih luas lagi dari itu.

Srivastava⁷ mencoba memaparkan definisi *soft diplomacy* sebagai praktek kebijakan luar negeri dari sebuah negara atau organisasi regional yang tidak secara eksklusif melayani kepentingan negaranya saja, akan tetapi sudah menyentuh kepada kepedulian terhadap kepentingan global, misalnya membantu permasalahan ekonomi maupun politik yang sedang dihadapi oleh negara lain. Hal inilah yang menjadi *highlight* BDSC dalam BDF. Upaya KEMLU RI dalam menanamkan serta menyebarkan nilai-nilai *soft power* demokrasi kepada generasi muda (mahasiswa), peserta BDSC akan memiliki *multiple impact* di masa depan sebagai bagian dari pencapaian tujuan jangka panjang, turut berperan aktif menciptakan perdamaian dunia (Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945, alinea 4). Sebagai salah satu contoh *case study*, apa yang dilakukan Norwegia dan Uni Eropa telah pula dilaksanakan dengan fasih oleh Indonesia. Dengan percaya diri, dapat dinyatakan Indonesia menjadi pelaku *soft diplomacy* yang mengemuka bersama-sama Norwegia maupun Uni Eropa.

⁵Srivastava, Vivek Kumar. 2013. *Soft Power And Soft Diplomacy: Nature, Comparison And Impact*. University of Southern Denmark, Campus Sonderborg, Denmark.

⁶Nye, Joseph S, Jr. 2008. *Public Diplomacy and Soft Power*. Annals, AAPSS, 616. The Annals of the American Academy.

⁷Op.Cit.

Burnay⁸ mengemukakan pemahaman tentang *soft diplomacy* sebagai hasil analisa melalui praktik *people-to people dialogue* dalam kerjasama *Strategic Partnership* Uni Eropa dan China. Apabila mengacu kepada Burnay, *soft diplomacy is one particular soft part of the new public diplomacy, namely the use of instruments which invest in mutual exchanges and learning processes rather than actions that tend to influence the attraction of the other by unilateral means (such as the set-up of cultural institutes in third countries).*

Menurutnya, sangat jelas bahwa *soft diplomacy* adalah bagian dari diplomasi publik kontemporer (*the new public diplomacy*). Lebih lengkap lagi Burnay mengemukakan lima komponen yang harus muncul sebagai karakteristik dari praktik *soft diplomacy* yang sejalan dengan apa yang disampaikan Cull tentang ciri-ciri *new public diplomacy* yang menjadi pembeda dari *old public diplomacy*:⁹

- a. Penguatan *soft power*
- b. Proses *two way street* dalam pertukaran ide berdasarkan kesepahaman
- c. Implementasi *two way street* dalam pertukaran ide, pembelajaran dan proses *self reflexive*
- d. Mengakomodir kehadiran *non governmental actor* atau aktor non pemerintah.
- e. Mengusung muatan *soft issue*

Kelima karakteristik diatas akan dapat ditemukan ketika menganalisa pelaksanaan BDSC dalam BDF. *Pertama*, penguatan *soft power* demokrasi jelas dilakukan dimana BDSC dan BDF dilaksanakan paralel. *Kedua*, Kementerian Luar Negeri dari berbagai negara peserta BDF, menggunakan G2G forum bersama-sama menyadari pentingnya peran generasi muda/mahasiswa. Melalui *P2P contact*, BDSC melakukan proses penguatan, penanaman serta meluaskan pengaruh demokrasi di masa depan. *Ketiga*, implementasi komunikasi dua arah tercapai dalam BDSC.

Karakteristik selanjutnya dari *soft diplomacy* dalam BDSC yang *keempat*, pengaruh *soft diplomacy* erat sekali dengan inisiatif pemerintah yang memperhatikan untuk mengikutsertakan atau tidak mengesampingkan peran aktor non pemerintah untuk pengaruhnya secara jangka panjang terhadap hubungan diplomatik di masa depan. Mahasiswa dari seluruh dunia yang merupakan representasi generasi muda mendapatkan kesempatan untuk terlibat aktif, sejajar dalam berbagi ide, pengalaman serta proses pembelajaran demokrasi antar negara dalam BDF.

Karakteristik yang terpenting adalah yang *kelima*, mengusung *soft issue* demokrasi. Disini mahasiswa sejak awal telah menyatakan kesediaan untuk peduli dan memperhatikan pentingnya isu demokrasi sebagai bagian esensial dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal ini membuat mahasiswa peserta BDSC yang hadir akan berkontribusi aktif sepanjang forum berlangsung dan bertanggungjawab untuk memberikan rekomendasi terbaik tentang demokrasi untuk kesejahteraan dan perdamaian dunia. BDSC yang dilaksanakan paralel dengan BDF menjadi bukti otentik terjadinya *government to government (G2G)* dalam *Bali Democracy Forum (BDF)* yang tidak mengesampingkan peran aktor non pemerintah, melalui akomodasi forum *people to people (P2P) dialogue*, Bali Democracy Students Conference (BDSC).

KESIMPULAN

⁸Burnay, Matthieu; Hivonnet, Joelle & Raube, Kolja. 2014. "Soft Diplomacy" and People to People Dialogue between the EU and the PRC. European Foreign Affairs Review 19, Special Issue (2014): 35-56. Kluter Law International BV. The Netherlands

⁹Cull, Nicholas J. 2009. *CPD Perspectives On Public Diplomacy. Public Diplomacy: Lesson from the Past.* USC Center on Public Diplomacy at the Annenberg School.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan, *Pertama*, yang hendak dikemukakan melalui kajian pada tulisan ini adalah adanya fakta tahun kedua gelaran *Bali Democracy Students Conference*, paralel dengan *Bali Democracy Forum XI* di tahun 2018 telah menguatkan indikasi praktik *soft diplomacy* yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia terus berkelanjutan dengan pencapaian yang signifikan. *Kedua*, dengan adanya BDSC maka terjadi penajaman salah satu karakteristik dari *soft diplomacy* yaitu G2G yang menerima atau mengakomodir peran P2P. Dalam wacana ini maksud dari pernyataan tersebut adalah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan forum antar pemerintah, *Bali Democracy Forum* (BDF) telah mencapai sebuah langkah maju dengan telah terselenggaranya *Bali Democracy Students Conference* (BDSC) sebanyak dua kali di tahun 2017 dan 2018. *Ketiga*, adalah fakta terjaganya komitmen serta konsistensi untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dipegang teguh oleh Indonesia melalui representasi Kementerian Luar Negeri yang semakin aktif memberikan ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan aktor non pemerintah dalam mengusung *soft issue democracy*.

DAFTAR PUSTAKA

- Burnay, Matthieu; Hivonnet, Joelle & Raube, Kolja. 2014. "Soft Diplomacy" and People to People Dialogue between the EU and the PRC. *European Foreign Affairs Review* 19, Special Issue (2014): 35-56. Kluter Law International BV. The Netherlands
- Cull, Nicholas J. 2009. *CPD Perspectives On Public Diplomacy. Public Diplomacy: Lesson from the Past*. USC Center on Public Diplomacy at the Annenberg School.
- Cristo, Donna A. "Soft Power: The Means to Success in World Politics" (Book Review). *American Economists* 49.2 (2005): 99-100
- Lusiana, E. 2018. *Soft Diplomacy Indonesia Melalui Bali Democracy Forum dalam Mendukung Kerjasama Regional Asia Pasifik*. Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.
- Nye, Joseph S, Jr. 2008. *Public Diplomacy and Soft Power*. *Annals, AAPSS*, 616. The Annals of the American Academy.
- Srivastava, Vivek Kumar. 2013. *Soft Power And Soft Diplomacy: Nature, Comparison And Impact*. University of Southern Denmark, Campus Sonderborg, Denmark